

Jurnal REP  
(Riset Ekonomi Pembangunan)

Volume 3 Nomor 2  
<http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP>

## MODERNISASI & KELOMPOK MENENGAH INDONESIA

### INDONESIAN MIDDLE SOCIETY & MODERNIZATION

**Iskandar**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga

#### **Abstract**

*This paper describes the problems of development in Indonesia that relate to aquatic resources, forestry, and Indonesian middle-class groups that are superior in its development structure. Development barriers in aquatic resource development need modernization. Modernization is a necessity in the process of aquatic development, forestry and Indonesian middle groups. The use of appropriate technology is a resource that supports the development of middle-class development. In this study, descriptive analysis methods were used for the strengths and weaknesses of Indonesia's economic development potential. Primary data is used to describe the problems of modernization and middle group development. Data collection was carried out through literature review, article review and then processed so that the conclusions of this writing could be developed organizational theory, modernization and empirical evidence. The results of this paper state that the process of modernization for Indonesia's economic development and middle class needs to be done, the reorientation of development issues in relation to aquatic resources and forestry and the development of Indonesian middle groups needs to be a top priority.*

*Key words: aquatic resources, modernization, msms*

#### **Abstrak**

Tulisan ini mendeskripsikan persoalan pembangunan di Indonesia yang berkaitan dengan sumber daya aquatic, kehutanan, kelompok menengah Indonesia yang menjadi keunggulan dalam struktur pembangunannya. Hambatan pembangunan dalam pengembangan sumberdaya aquatik perlu modernisasi. Modernisasi adalah satu keharusan dalam proses pembangunan aquatic, kehutan dan kelompok menengah Indonesia. Pemakaian teknologi tepat guna menjadi sumber daya yang menopang pengembangan pembangunan kelompok menengah. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analisis terhadap kekuatan dan kelemahan potensi pembangunan ekonomi Indonesia. Data-data primer digunakan untuk mendiskripsikan masalah-masalah modernisasi dan pengembangan kelompok menengah. Pengumpulan data dilakukan dengan telaah pustaka, review artikel dan kemudian diolah agar kesimpulan penulisan ini dapat dikembangkan teori organisasi, modernisasi dan bukti empirik. Hasil dari penulisan ini menyatakan bahwa proses modernisasi bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan kelompok menengah perlu dilakukan, reorientasi persoalan

pembangunan dalam kaitan dengan sumberdaya aquatic dan kehutanan serta pengembangan kelompok menengah Indonesia perlu menjadi prioritas utama.

Kata kunci: sumber daya aquatik, modernisasi, umkm.

## PENDAHULUAN

Kata pembangunan telah menjadi bahasa dunia. Keinginan bangsa-bangsa untuk mengejar bahkan memburu masa depan yang lebih baik menurut kondisi dan metode masing-masing, telah melahirkan berbagai konsep pembangunan. Konsep itu antara lain pertumbuhan (*growth*), rekonstruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernisation*), westernisasi (*westernisation*), perubahan sosial (*social change*), pembebasan (*liberation*), pembaharuan (*innovation*), pembangunan bangsa (*nation building*), pembangunan nasional (*national development*), pengembangan dan pembinaan.

Pembangunan Ekonomi menyatakan adanya pertumbuhan ekonomi hal ini berarti kenaikan pendapatan nasional secara nyata dalam kurun waktu tertentu. Dalam tahapan ini Rostow menjelaskan bahwa tahap pertumbuhan masyarakat dimulai dari: (1) masyarakat tradisional, tahap ini ditandai dengan keterikatan pada lingkungan dan sistem masyarakat feodal; (2) tahap transisional, pada tahap ini lahir masyarakat kelas menengah yang menguasai bisnis perdagangan. Di samping itu muncul aktivitas baru dibidang transportasi dan modernisasi pertanian. Dalam fase ini tahap tinggal landas didisiapkan ; (3) tahap tinggal landas, tahap ini ditandai dengan peningkatan investasi dan pendapatan masyarakat secara nyata, dan pada tahap ini terjadi perubahan mendasar di bidang industri, antara lain meluasnya peranan sektor industri unggul; (4) tahap pemantapan (pendewasaan), ditahap ini telah menggunakan teknologi tinggi, sektor industri mempengaruhi sektor lainnya dan tumbuh manajemen profesional ; (5) tahap konsumsi masa tinggi, tahap ini ditandai dengan kemampuan masyarakat yang berkembang secara mandiri. (Rostow, 1960)

Beberapa faktor pendukung pertumbuhan ekonomi di suatu negara biasanya diikuti dengan:

1. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumberdaya manusia.
2. Perkembangan penduduk dalam arti peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja.
3. Kemajuan teknologi, yaitu metode baru yang telah diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. (Todaro, 2015)

Ketiga konsep diatas adalah pola pembangunan yang pernah, paling tidak mempengaruhi proses dan perkembangan pembangunan di Indonesia. Namun demikian, persoalan pembangunan yang ada adalah didominasi ekonomi tanpa memperdulikan secara mendalam persoalan lain yang berhubungan dengan ekonomi. Salah satu persoalan berat dalam konsep pembangunan dalam arti pertumbuhan ekonomi ialah kemungkinan terjadinya pertumbuhan saja tanpa didukung dan diiringi oleh perubahan sosial dimasyarakat. Persoalan itu bisa berupa dehumanisasi, pengangguran, kerusuhan, kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan pendapatan dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi jika tidak diikuti oleh kemampuan dan ketahanan sosial adalah ibarat bayi, walaupun subur

dan bobotnya bertambah terus, atau meningkat cepat seorang bayi tetaplah bayi, tidak berkemampuan.

Dalam tulisan kali ini penulis mencoba untuk melakukan kajian terhadap persoalan pembangunan dalam beberapa konsep diatas dengan mengkaitkan pada perubahan sosial, terutama pada konsep modernisasi dan peranan kelas menengah Indonesia, dalam kaitannya dengan masalah pembangunan. Modernisasi, kelas menengah dan perubahan sosial yang dimaksud penulis disini yaitu, konsep dalam konteks teoritis dan konsep dalam pandangan umum masyarakat Indonesia, serta implementasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam pembangunannya terutama dalam sumber daya kelautan, UMKM, dan Kehutanan serta sektor keuangan. Dalam masalah perubahan sosial yang ingin di teropong dalam tulisan ini adalah bentuk perubahan yang dimaksud serta cara-cara yang dilakukan dalam perubahan tersebut.

## METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan deskriptif analisis terhadap kekuatan dan kelemahan potensi ekonomi Indonesia. Data-data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini sejauh dapat ditemukan dan sesuai dengan topik penelitian. Pengeumpulan data dilakukan dengan telaah pustaka, review artikel untuk kemudian diolah menjadi data yang mendukung sehingga dalam pengambilan kesimpulannya didasarkan pada teori dan bukti empirik yang kuat. Analisis data menggunakan SWOT analisis dalam hal mana kelemahan dan kekuatan serta kesempatan untuk mengembangkan potensi dijelaskan secara deskriptif.

## LANDASAN TEORI

### Dimensi Modernisasi & Teori Modernisasi Selayang Pandang

Modernisasi merupakan istilah populer. Reihard Bendix dalam Willard A. Beling dan George O. Totten, *Pembangunan Masyarakat* (1990) menjelaskan bahwa modernisasi adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang berasal dari revolusi Industri di Inggris (1760-1830) dan revolusi politik di Prancis (1789-1794). Aspek yang paling menonjol dalam proses modernisasi adalah perubahan teknik industri dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern yang dihasilkan oleh revolusi Industri. J. W. Schoorl memberikan definisi modernisasi sebagai penerapan pengetahuan ilmiah yang ada pada semua aktivitas masyarakat, semua bidang kehidupan atau semua aspek. (Ndaha, n.d.)

Pendapat Schoorl ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Syed Hussein Alatas jauh sebelumnya yaitu: *modernization is the process by which modern scientific knowledge covering all aspects of human life is introduced at varying degree, first in western civilization, and latter diffused to the non Western wolrd, by different methods and groups with the ultimate purpose of achieving a better and more satisfactory life in the broadest sense of the term, as accepted by society concerned.* (Evers & Institute of Southeast Asian Studies., 1973). Dari uraian ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa proses modernisasi terdapat dimana-mana, baik dinegara maju maupun negara dunia ketiga. Modernitas diukur dengan sejauh mana bangsa yang bersangkutan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab.

Modernisasi adalah: (1) teori ini didasarkan pada dikotomi modern tradisional. Yang modern merupakan simbol kemajuan, pemikiran rasional, metode kerja efisien, dan seterusnya. Masyarakat modern dianggap sebagai ciri masyarakat dinegara-negara industri maju. Sebaliknya masyarakat tradisional merupakan kebalikannya. (2) Teori modernisasi juga didasarkan pada faktor-faktor nonmaterial sebagai penyebab kemiskinan, khususnya dunia ide atau alam pikiran. Faktor-faktor ini kemudian menjelma kealam psikologi individu atau nilai-nilai kemasyarakatan yang menjadi orientasi penduduk dalam memberikan arah tingkah laku. (3) Teori modernisasi biasanya ahistoris. Hukum-hukumnya sering dianggap berlaku secara universal tanpa memperhatikan faktor waktu dan tempat. Contoh dari kasus ini adalah masalah rasionalitas, atau masalah efisiensi. Ada kecenderungan bahwa konsep ini dpat belaku kapan saja dan dimana saja. Akhirnya teori ini menjadikan faktor yang mendorong dan yang menghambat pembangunan harus dicari didalam negara-negara yang bersangkutan. Bukan faktor eksternal negara yang bersangkutan. Misalnya jika pendidikannya yang dianggap sebagai faktor penghambat, maka faktor ini harus diselesaikan oleh negara setempat, demikian pula faktor penghambat lainnya. (Budiman, Assyaukanie, & Stanley, 2006)

Jika modernisasi didefinisikan seperti diatas dan berlaku pada seluruh aspek kehidupan manusia, khususnya manusia Indonesia, proses modernisasi akan menjadi suatu kekuatan pembangunan yang besar. Tetapi yang terjadi sesungguhnya adalah diluar kemampuan bangsa Indonesia, atau barangkali ada suatu proses yang keliru, sehingga modernisasi di Indonesia didefinisikan sebagai Industrialisasi. Kalau asumsi ini benar maka proses demoralisasi dan dehumanisasi yang terjadi saat ini dapat dikatakan sebagai ‘biang kerok’ keberhasilan pembangunan.

Jika penerapan ilmiah dilakukan dalam proses pembangunan bangsa sesuai kaidah modernisasi, maka pembangunan itu pada akhirnya merubah sikap mental bangsa, menjadi bangsa yang selalu berupaya untuk mengembangkan diri, sebagaimana yang dikenalkan oleh Mc. Clelland. Kita sadari bahwa dampak sosial budaya dari proses modernisasi adalah masyarakat kita mulai berorientasi kemasa depan, meninggalkan masalah kehidupan dengan berorientasi kemasa silam. Kebiasaan berorientasi kedepan dipupuk dengan kebiasaan hidup berencana dan terencana. Dalam hal mana rencana adalah salah satu alternatif dari skenario masa depan yang dicapai melalui suatu rekayasa. Sikap positif seperti inilah yang harus senantiasa dikembangkan oleh kita selaku bangsa Indonesia dalam rangka mengantisipasi masa depan melalui proses modernisasi secara matang.

Persoalannya adalah apakah seluruh kelompok masyarakat telah siap menerima konsep modernisasi sesuai dengan teori yang sesungguhnya, ataukah hanya ada sebagian masyarakat saja, atau barangkali hanya kelompok menengah dan elit tertentu yang menerapkan modernisasi dalam kehidupannya, sehingga berakibat tidak positif bagi pembangunan kita. Bukti empirik dalam kasus ini tentu dapat kita lihat bahwa saat ini terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup dashyat, dalam hal mana sebagian kelompok masyarakat (menengah atas) melambung tinggi akibat kemajuan dan perubahan sosial, sedangkan sebagian lagi tertinggal dibelakang, tenggelam dan jauh sekali dari kata ‘makmur’.

### **Siapa Kelompok Menengah Indonesia**

“Sang Empu” kelas dunia Karl Marx sering sekali berbicara tentang kelas-kelas sosial, namun demikian tidak pernah secara tuntas mendefinisikan istilah ‘kelas’. Sepertinya Marx

membiarkan masyarakat untuk mengembangkan kreatifitasnya sendiri untuk berbicara tentang ‘kelas’ yang dimaksudnya. Awal-awalnya istilah yang sering digunakan untuk masalah ini adalah mengikuti definisi kelas yang dikenalkan oleh Lenin, dalam hal mana “kelas sosial” dianggap sebagai golongan sosial dalam sebuah tatanan masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam proses produksi. Dalam hal inipun masih belum dapat dikatakan jelas seratus persen. Apakah para ilmuwan masuk dalam kelas sendiri, bagaimana dengan para amtenar, militer, mahasiswa, pengusaha, dan kelompok lainnya dapat dikatakan ‘kelas’.? Tulisan ini saya tidak membahas masalah ini secara detail namun demikian saya berusaha untuk melihat bagaimana sesungguhnya kelas menengah Indonesia secara sederhana.

Membicarakan kelas menengah Indonesia, sama sulitnya ketika Marx mencanangkan teorinya tentang kelas. Persoalannya adalah: yang menjadi tolok ukur kelas menengah tersebut pada sisi apanya, apakah pendidikannya, ekonominya, kesadaran hukumnya, atau ada standar tertentu yang dapat dibentuk sedemikian rupa sehingga batasan kelas menengah Indonesia dapat dengan jelas terdeskripsi secara baik. Dalam kaitan ini saya mencoba untuk meformulasikan bahwa kelas menengah Indonesia dapat terdiri dari berbagai macam kategori, sedangkan skala ukurnya adalah ada pada dimensi: pendidikan, sosial ekonomi, politik, kesadaran hukum dan budaya.

Proses paralelisasi, similarisasi, dan verifikasi dengan kelas menengah yang ada di Hongkong pada awal tahun 1970-1980 adalah contoh yang menarik untuk dicermati. Pada kasus Hongkong, yang menjadi kelompok kelas menengah adalah para buruh sayap kiri, organisasi pers, lingkungan akademisi, dan organisasi perdagangan. Berbeda dengan Hongkong, kasus kelas menengah Indonesia tidaklah demikian. Dalam dataran ekonomi, kelas menengah Indonesia adalah sekelompok masyarakat yang memiliki hubungan dengan birokrat.

Hubungan ini dilakukan dalam upaya membangun ‘kerajaan’ bisnisnya agar terlindungi atau paling tidak dapat hidup dalam kondisi apapun. Kasus ini tentu terjadi dalam masa pemerintahan Orde Baru. Apakah pemerintahan Reformasi tidak demikian? Atau ada perubahan pola? Agaknya masih terlalu dini untuk dianalisa. Fakta sejarah menyatakan bahwa Indonesia kontemporer dalam Orde Baru merefleksikan minat-minat yang saling bersaing dari kelompok-kelompok menengah.

Setidaknya kelompok kelas menengah Indonesia ada tiga kelompok utama, yaitu: pertama, kelompok pedagang muslim yang terkonsentrasi diperdagangan dan komoditas dalam skala kecil. Kelompok ini tetap berada dalam lingkungan kekuatan politik birokrat. Kedua, kelompok aliansi dari birokrat sipil, siswa sekolah, intelektual, yang pada pokoknya sebagai produk dari pembangunan. Dan yang ketiga adalah birokrasi militer. Menurut saya masih ada satu kelompok lagi yang mungkin dapat dijadikan sebagai tambahan kelas menengah Indonesia yaitu kelompok pedagang China, Arab, India, dan Warga keturunan lainnya yang juga memainkan peranan dalam kehidupan ekonomi.

Jika kita teropong dalam sisi pendidikannya, yang menurut saya juga berkaitan dengan biaya dan dalam hal ini juga berkaitan dengan masalah ekonomi, maka kelas menengah dengan parameter pendidikan adalah mereka yang mampu menyelesaikan jenjang pendidikannya sampai jenjang pendidikan tinggi. Keterkaitan antara pendidikan dan peranan sosialnya agaknya tak terpisahkan, demikian pula dalam kaitan dengan kesadaran hukumnya, bahwa kelompok menengah Indonesia

adalah akan dapat terukur dalam pendidikan dan ekonominya. Argumennya adalah, ekonomi yang tinggi akan membuat seseorang dapat berpendidikan tinggi demikian sebaliknya, pendidikan tinggi akan meningkatkan perannya dimasyarakat, juga meningkatkan peran dan kesadarannya dalam hukum. Dengan demikian, menurut saya kelas menengah Indonesia dapat diteropong dari faktor pendidikan atau ekonomi atau keduanya.

### **Kelompok Menengah dalam Tinjauan Sosiologis**

Strukturalis menyatakan bahwa munculnya kelas baru yang adalah karena adanya perjuangan antar kelas, baik secara positif maupun secara kontraktif. Dalam hal ini batas kelas amat sulit ditentukan karena anggota kelas yang ada pada suatu saat bisa berubah kelasnya sesuai dengan peran yang dimainkannya. Kelas subordinat dalam istilah strukturalis akan berjuang untuk kepentingannya dengan melakukan pengurangan divisi internal, perbedaan antara anggotanya. Perpecahan internal harus dikurangi bahkan jika bisa dihilangkan.

Dalam konstelasi politik Indonesia, sisi etnis, agama, paham ideologi semestinya dikesampingkan agar kelas menengah ini menjadi solid dan dapat memainkan perannya dengan baik. Solidaritas, komunitas, kolektifitas adalah kata kunci menuju keberhasilan atas perjuangan kelas. Dalam kasus ini situasi kelas yang digambarkan paham strukturalis agaknya cocok dengan kondisi ke Indonesiaan bila hanya dikaitkan dengan jabatan profesionalisme belaka, misalnya kelas buruh yang ahli, semi ahli dan kurang ahli, atau kelas manager, manajer menengah dan manajer bawah. Serta kelembagaan profesional lainnya. Akan tetapi konteks Indonesia menjadi sulit, karena batas ini tidak terlihat dengan jelas. Kongkritnya adalah manajer Koperasi akan berbeda dengan manajer Bank, walaupun Ia berada dalam kelompok manajer.

Nampaknya kelompok menengah Indonesia mulai tumbuh lebih pesat sejak Orde Baru, terutama dengan dibinanya jalur birokrasi antara penguasa, militer dan konglomerat dalam hal mana kelompok menengah berusaha untuk mendekati pemegang 'hegemoni' ekonomi Indonesia yaitu Trio ABRI, Pemerintah dan Konglomerat. Kelompok ini timbul melalui gagasan, dan kesadaran warga asli untuk meningkatkan potensi ekonomi yang dimilikinya.

Setelah kelompok ini terbentuk, ternyata pola budaya yang dulu cukup guyub dan meninggikan nilai moral dan budaya luhur bergeser pada budaya 'selamatkan diri masing-masing'. Standar yang selama ini dipegang sebagai nilai luhur yang berkembang untuk saling asah-asih dan asuh berubah menjadi budaya mengambil keuntungan sendiri disinilah letak perubahan sosial yang terjadi.

Implikasinya dalam distribusi pendapatan bahwa kelas menengah kurang memperhatikan masyarakat arus bawah. Basic needs yang sangat rendah dibiarkan berlalu begitu saja, kondisi upah buruh yang menahun dalam kesengsaraan tidak dapat berubah kelasnya bahkan menjadi kelompok yang tertindas dan hidup dalam kukungan tindak represif kaum kapitalis. Pada tataran ini maka modernisasi dan kelas menengah Indonesia harus berbenah diri. Terutama dalam hal etika pembangunan, sehingga pertanyaan yang diajukan oleh kaum miskin dan intelektual sejati, haruskah modernisasi mengorbankan rakyat kecil? Menjadi tidak ada, dan diganti dengan slogan Modernisasi dan kelas menengah Indonesia adalah kelompok yang peduli pada kemakmuran rakyat. Modernisasi seharusnya menggerakkan rakyat kita agar merubah pola pikirnya menjadi lebih maju, dinamis dan

progresif dalam memandang masa depannya. Dan kelompok menengah seharusnya menjadi motor penggerak bagi kemakmuran bangsa.

### **Kelompok Menengah dan Proses Pembangunan**

Sebenarnya proses pembangunan adalah tanggung jawab semua komponen bangsa, akan tetapi dalam perjalanannya, yang berperan secara aktif adalah mereka yang dapat berpikir, dan pikiran itu biasanya didapatkan dalam jalur pendidikan, akibatnya adalah rakyat tidak dapat berpartisipasi secara utuh kecuali hanya menjadi obyek pembangunan dan bukan subyek pembangunan yang aktif.

Disadari atau tidak bahwa salah satu penyebab tidak meratanya distribusi pendapatan yang sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah akibat salah arah dan salah sasarannya kelas menengah Indonesia dalam menginterpretasikan makna dan konsep pembangunan kita. Industrialisasi yang dilakukan secara tidak sadar, tidak dibarengi dengan pengembangan pembentukan nilai luhur bangsa. Konsep pembangunan melulu dalam basic ekonomi dan sedikit sekali berorientasi pada persoalan selain ekonomi. Keadilan ekonomi, dan aturan main yang saling mensejahterakan belum berkiblat pada rakyat. Pemerintah dan pengusaha yang diharapkan dapat mengalirkan profitnya melalui konsep '*trickle down effect*' ternyata tidak terjadi bahkan sebaliknya sikaya mendapatkan subsidi dari rakyat dengan tenaga yang dibayar murah. Sementara mereka yang beraliran Neo Marxis, yang menyatakan 'pemerataan dengan pertumbuhan' (*redistribution with growth*) juga tidak kunjung tiba.

Satu dekade dalam hitungan sepuluh tahun kedepan, bonus demografi Indonesia adalah melimpahnya kelompok menengah masyarakat. Kelompok inilah yang akan membawa gerbang pembangunan Indonesia kearah yang lebih baik. Tingkat pendidikan dan pengalaman kelompok ini dalam teknologi sudah sangat memadai, sumber daya insani inilah yang diharapkan dapat menselaraskan modernisasi di Indonesia menjadi sebuah alat untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

### **EKONOMI UNGGULAN INDONESIA**

Dominasi laut dan perairan di wilayah Indonesia, telah menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Sekitar 17.504 pulau dengan garis pantai nomor dua dunia setelah Kanada, mendeskripsikan bahwa Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang luar biasa. Keanekaragaman sumber daya kelautannya, biota laut, keindahan alamnya tidak saja menjadi sumber ekonomi perikanan dan kelautan yang besar tetapi juga menjadi destinasi wisata bahari yang menyenangkan.

Produksi perikanan tangkap Indonesia berdasarkan FAO pada tahun 2016 menempati urutan kedua tertinggi dunia pada perairan laut. Wilayah ini mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup> yang meliputi 11 wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Disamping potensi tangkap, wilayah pesisir pantai juga memiliki potensi budidaya perikanan laut sebesar 12.123.383 Ha.(BPS, 2017) Kekayaan hayati kelautan lain yang dimiliki Indonesia juga berpotensi memberikan kontribusi pada pendapatan

negara. Wisata bahari dengan keindahan terumbu karang Indonesia di berbagai pulau menjadi daya tarik sendiri dan memberikan sumbangsih bagi pemasukan kas daerah dan nasional.

Mineral dan tambang plus cadangan gas dan minyak bumi berada didalam cekungan-cekungan laut lepas pantai dan separuhnya berada di laut dalam. Potensi yang banyak ini belum secara optimal dimanfaatkan demikian pula dengan jasa kelautan, perdagangan dan industri maritim Indonesia.

Pemerintah baru melaksanakan program Tol Laut, Poros Maritim Dunia dan pemberantasan pencurian ikan dan penyelundupan. Neraca perdagangan sisi kelautan ini meningkat 1,49 persen , sementara impor ikan terjadi penurunan sekitar 6 persen. Trend kenaikan kesiapan pangsa pasar ikan juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 8,69% atau sekitar 9,96 juta ton ikan pertahun. (BPS, 2017)

Data statistik penangkapan ikan juga mengalami peningkatan sebesar 13,19%, pertumbuhan ini membuktikan adanya kesadaran dari kementerian kelautan akan potensi laut yang dimiliki, bagaimana dengan proses modernisasinya. Industr perikanan pasca panen nampaknya perlu modernisasi yang lebih agar potensi ini dapat dimanfaatkan dengan signifikan pula. Industri penangkapan ikan juga mengalami peningkatan data statistik menunjukkan peningkatan pertumbuhan sekitar 9,49% sementara budidaya hanya tumbuh 2,91% persoalan permodalan para pelaku bisnis ini dan para nelayan kerap menjadi masalah yang belum terselesaikan. Cuaca buruk kadang menjadi dilema tersendiri bagi para nelayan mengingat modernisasi kapal penangkap ikan nelayan tradisional belum terpenuhi. (BPS, 2017)

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2013), jumlah nelayan di Indonesia hanya sekitar 2.164.969 jiwa. Angka tersebut hanya sekitar 1,95 persen dari jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja (Sakernas, 2013). Kecilnya persentase penduduk yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan dapat disebabkan karena banyak hal, di antaranya penghasilan nelayan yang tidak pasti dan nilai upah yang kecil, pemanasan global yang mengakibatkan ketidakpastian cuaca, dan lain-lain. Dominasi nelayan tradisional masih pada penangkapan ikan belum pada kemauan untuk melakukan budidaya ikan. Dilema membuka lahan budidaya baru dengan masalah ekosistem laut selalu berjalan berhimpitan sehingga pemanfaatan teknologi tepat guna dalam hal ini modernisasi memang sangat dibutuhkan.

Melihat sumber daya aquatic Indonesia sangat melimpah, pemberdayaan nelayan sebagai salah satu penguat sektor perikanan dan kelautan perlu menjadi prioritas utama disamping juga modernisasi ketahanan laut Indonesia dari penjarahan negara lain. Pada sisi lain dari sumber daya aquatik Indonesia adalah pada sektor jasa pelabuhan dalam hal mana kondisi pelabuhan Internasional yang ada di Indonesia dapat menjadi daya tarik sendiri dalam sirkulasi transportasi laut. Pulau Batam Riau, Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Emas Semarang Jawa Tengah, Tanjung Perak Jawa Timur, dan beberapa pengembangan yang sedang dilakukan perlu modernisasi sistem dan pelayanan.

Pengembangan pelabuhan Di Demak Jawa Tengah adalah contoh pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir pantai yang cukup memadai untuk area pelabuhan tentunya tidak boleh meninggalkan persoalan lingkungan hidup sehingga pemanfaatan sumber daya kelautan ini



memerlukan teknologi yang memadai, sumber daya manusia yang handal dan capital yang terkoordinir. Pemanfaatan teknologi iklim dan cuaca sebagaimana yang sudah dilakukan saat ini perlu mendapatkan proses modernisasi dengan teknologi kelautan dan keterkaitannya dengan geografi, klimatologi, cuaca dan gelombang laut.(Ervita & Marfai, 2017)

Hal lain yang bisa juga dijadikan tolok ukur pembandingan terhadap pengembangan pelabuhan dan masalah kepabeaian serta perkapalan adalah sebagaimana yang dilakukan Yunani. Yunani telah melakukan industri jasa pelabuhan dan Perkapalan sejak lama dan memiliki kontribusi terhadap perekonomian negaranya, data ini bisa kita lihat dari beberapa penelitian yang dilakukan terhadap ekonomi Yunani dan keterkaitannya dengan industri kelautan. (Goulielmos, 2018) Pengembangan kebijakan dan regulasi telah dilakukan penyesuaian sehingga industri kelautan Yunani menjadi faktor penunjang perekonomiannya.

Belajar dari kasus Yunani nampaknya Indonesia perlu melakukan kebijakan khusus dalam sektor kelautannya sehingga potensi Laut Indonesia benar benar menjadi bagian yang dapat mensejahterakan nelayan Indonesia pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Kehutanan Indonesia yang tersebar di Jawa, Kalimantan, Sumatera sebagian Sulawesi juga menjadi sektor yang memiliki daya saing tinggi bila dibandingkan sektor pertanian. Kehutanan dan Perkebunan bisa menjadi dua primadona penyumbang pendapatan ekonomi Indonesia bila penggarapan dan manajemennya bisa secara simultan di sesuaikan dengan kondisi kekinian. Keterlibatan masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh Perhutani agar terjadi simbiosis mutualisme adalah bagian dari sistem ekonomi Pancasila yang berkeadilan. Hutan Indonesia yang menjadi jantungnya dunia disamping Amazon Afrika perlu modernisasi sistem tanam, masa tebang dan penanaman kembali hingga terjadi sirkulasi yang baik dalam siklusnya.

Resiko penebangan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu dapat terjaga bila keterlibatan masyarakat setempat di akomodasi dengan baik dengan melakukan sistem bagi pendapatan. Usaha ini berarti bahwa pengembangan UMKM sektor kehutanan berperan dalam proses pengentasan kemiskinan serta menstabilkan distribusi pendapatan yang proposional dan merata. UMKM sektor perdagangan nampaknya perlu di kolaborasikan dengan sektor lain, sehingga keinginan pemerintah untuk menumbuh kembangkan UMKM diatas 7% bisa terealisasi.(Chen, 2018)

Perbankan sebagai salah satu industri jasa yang mensupport keberadaan UMKM perlu mencari format baru sehingga persoalan kolateral ataupun jaminan kredit yang akan diberikan perbankan terhadap UMKM ini bisa di laksanakan dan terwujud. Kondisi kekinian terhadap sumber pembiayaan yang digelontorkan Pemerintah Indonesia melauai bank Nasional dan Pondok Pesantren serta lembaga keuangan mikro lainnya dapat terealisasi tepat sasaran. Pengembangan UMKM seharusnya menjadi perhatian besar pemerintah Indonesia, hal ini juga sebagaimana yang dilakukan oh Moh Yunus di Bangladesh, dalam hal mana Gramen Bank yang di dirikannya menjadi penopang khusus bagi UMKM di negerinya. Bebrapa penelitian yang dilakukan di Malaysia dan Indonesia terhadap pengembangan industri keuangan mikro nampaknya perlu mendapatkan sentuhan modernisasi dan edukasi yang memadai.(Assegaf, Zakaria, & Sulaiman, 2012)

Peran sektor keuangan dalam hal ini Bank sangat diharapkan dalam membangun kemandirian UMKM, namun pada posisi ketidak stabilan nilai tukar rupiah saat ini nampaknya akan semakin mempersulit peran UMKM untuk berkembang. Saat ini keterpurukan nilai tukar rupiah bisa diartikan bahwa peran Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter Indonesia masih sulit menemukan formula yang terbaik, ketergantungan pada konstelasi politik dan ekonomi dunia masih dominan, sehingga imbas keterpurukan juga menjadi bagian dari situasi yang harus di selesaikan oleh Indonesia.

Sistem Kurs mengambang yang ditetapkan dalam kebijakan moneter Indonesia sejak Agustus 1997 memberikan makna bahwa Indonesia menganut sitem pasar dalam hal mana permintaan dan penawaran itu berjalan dengan bebas di pasar internasional. Olehkarenanya wajar apabila imbas kurs rupiah terhadap dollar Amerika berfluktuasi sebagaimana pasar. Efek krisis 1997 dan krisis 2008 membuat nilai tukar rupiah melemah pada posisi Rp. 10.950/USD, fluktuasi ini terus berkembang dan sedikit mengalami kestabilan pada tahun 2013 dan 2014 tetapi kemudian meningkat lagi dan pada saat ini rupiah kembali melamah hingga tembus pada angka psikologis Rp. 15.000/USD.(Titko, Stankevičienė, & Lāce, 2014)

Distabilitas nilai rupiah terhadap dollar Amerika sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara. Faktor-faktor dominan yang menjadi pemicu perubahan kurs adalah variabel makroekonomi yang bergerak dinamis di setiap waktu. Tingkat suku bunga dalam dan luar negeri, jumlah uang beredar, inflasi adalah faktor yang mempengaruhi kurs. Pada beberapa penelitian dinyatakan bahwa perubahan kurs itu terjadi karena pendapatan Domestik Bruto, cadangan devisa suatu negara, tingkat inflasi, suku bunga, neraca pembayaran dan perbandingan ekspor impor. Penelitian lain mengatakan bahwa faktor hutang luar negeri juga menjadi variabel penentu.

Pada kasus Indonesia 2018 ini yang menjadi faktor pemicu utama adalah nilai impor yang lebih besar dari pada ekspor Indonesia. Pengaruh lain adalah meningkatnya permintaan uang domestik, pada sisi pendapatan domestik bruto menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan pendapatan (relatif terhadap negara tetangga), akan semakin besar kemungkinan impor yang berakibat pada tingginya permintaan mata uang asing. Hal yang sama akan terjadi sebaliknya yaitu jika ekspor suatu negara meningkat maka nilai mata uang asing akan terdepresiasi.

Potensi Kelautan, Kehutanan dan UMKM pada akhirnya akan berkorelasi dengan nilai kurs rupiah terhadap dollar Amerika, ini berarti kebijakan makroekonomi Indonesia masih sangat rentan dengan arus pasar Internasional dalam hal mana nilai tukar rupiah sangat di pengaruhi oleh mekanisme pasar. Pada sisi ini nampak kelambanan otoritas moneter dalam mengambil kebijakan untuk melakukan intervensi agar stabilitas nilai tukar dapat terjaga. Bila kondisi ini tidak teratasi maka kondisi ekonomi di sektor riil akan mengalami stagnasi dan kemandekan pertumbuhannya.

Struktur pembelanjaan dan pendapatan negara yang defisit juga menjadi cerminan bahwa perekonomian Indonesia sedang berjalan melambat dan kemungkinan akan terjadi. Defisit APBN sejak Januari 2018 menjadi pemicu juga, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap modernisasi infrastruktur Indonesia timur apakah ini juga menjadi pemicu terhadap lemahnya nilai tukar rupiah? Bila proses pembangunan tersebut menggunakan hutang maka dapat dipastikan kondisi ini akan berbalik menjadi beban bagi kelompok menengah Indonesia dimasa mendatang sebaliknya bila

kstabilan kurs rupiah terhadap dollar Amerika semakin baik maka kelompok menengah Indonesia akan menikmati kue pembangunan yang sedang berjalan.

Optimisme sumber daya kelautan, kehutan dan UMKM serta dengan didukung oleh industri keuangan yang stabil akan menjadikan kelompok menengah Indonesia bergerak maju disamping sektor Perdagangan, pertanian, perindustrian dan lainnya. Kondisi peningkatan sumber daya ini diharapkan lebih menunjang keuangan negara mengingat ekspor hasil laut dan hutan yang besar akan meningkatkan devisa negara dan juga mengakibatkan Apresiasi Rupiah terhadap dollar Amerika.

Proyeksi kelompok menengah Indonesia pada dekade ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 dimana populasi Indonesia di prediksi sekitar 360 juta penduduk. Kekuatan ini menjadi sumberdaya ekonomi yang kuat mengingat proses modernisasi akan berjalan dengan baik. Pemanfaatan sumberdaya teknologi dan juga kapital dapat secara signifikan mempengaruhi kegiatan ekonomi sektor publik. Daya beli masyarakat kelas menengah ini dapat di asumsikan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan pendapatannya.

Dimensi Makro Ekonomi Indonesia yang menjadi salah satu indikator keberhasilan Pembangunan nampaknya perlu dicermati dengan seksama mengingat kondisi kurs rupiah yang semakin tertekan dan kebijakan sektor moneter oleh otoritas moneter Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia perlu mendapat analisis yang mendalam. Neraca perdagangan yang minus sejak 2012 mestinya sudah menjadi warning tersendiri bagi pemerintah dalam hal kebijakan fiskal dan moneternya. Demikian pula dengan kurs rupiah yang sudah terlihat gejalanya sejak 2013 sudah terdepresiasi dan penurunan cadangan devisa menjadi bagian dari rapuhnya fundamental ekonomi Indonesia. Kondisi ini dapat dilihat dari Data Makro Ekonomi Indonesia.

**Tabel 1.** Data Makro Ekonomi Indonesia:

	2016	2017	2018 <sup>a</sup>	2019 <sup>a</sup>	2020 <sup>a</sup>
• <b>Produk Domestik Bruto</b> (% perubahan tahunan)	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4
• <b>Inflasi</b> (% perubahan tahunan)	3.0	3.6	3.75	4.0	4.0
• <b>Hutang Pemerintah</b> (% dari PDB)	27.9	28.5	31.5	33.0	35.0
• <b>Nilai Tukar</b> (IDR/USD)	13,309	13,381	14,000	14,250	
• <b>Neraca Transaksi Berjalan</b> (% dari PDB)	-1.8	-1.7	-2.5	-2.0	
• <b>Suku Bunga Acuan</b> (%)	4.75	4.25	6.00	6.50	
• <b>Penduduk</b> (dalam juta)	261	264	267	270	275
• <b>Kemiskinan</b> (% dari populasi)	10.7	10.1	10.0	9.8	
• <b>Pengangguran</b> (% dari tenaga kerja)	5.6	5.5	5.3	5.2	
• <b>Cadangan Devisa</b> (dalam miliar USD)	116.4	130.2	115.0		

	2011	2012	2013	2014	2015
• <b>Produk Domestik Bruto</b> (% perubahan tahunan)	6.2	6.0	5.6	5.0	4.8
• <b>Inflasi</b> (% perubahan tahunan)	5.4	4.3	8.4	8.4	3.4
• <b>Hutang Pemerintah</b> (% dari PDB)	23.1	23.0	24.9	24.7	26.9
• <b>Nilai Tukar</b> (IDR/USD)	8,773	9,419	11,563	11,800	13,389
• <b>Neraca Transaksi Berjalan</b> (% dari PDB)	0.2	-2.8	-3.3	-3.1	-2.1
• <b>Suku Bunga Acuan</b> (%)	6.00	5.75	7.50	7.75	7.50
• <b>Penduduk</b> (dalam juta)	245	248	251	254	258
• <b>Kemiskinan</b> (% dari populasi)	12.5	11.7	11.5	11.0	11.2
• <b>Pengangguran</b> (% dari tenaga kerja)	6.6	6.1	6.3	5.9	6.2
• <b>Cadangan Devisa</b> (dalam miliar USD)	110.1	112.8	99.4	111.9	105.9

\* menunjukkan prognosis

Sumber: Indonesia Investments, Bank Dunia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, International Monetary Fund (IMF) dan Fitch Ratings

## KESIMPULAN

- 1) Reinterpretasi pada konsep modernisasi perlu dilakukan, terutama bagi kelompok menengah Indonesia. Bahwa modernisasi adalah sebagai penerapan pengetahuan ilmiah yang ada pada semua aktivitas masyarakat, semua bidang kehidupan atau semua aspek, dan diukur dengan sejauh mana bangsa yang bersangkutan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab.
- 2) Salah satu jalan mendekati modernisasi secara benar adalah dengan pendidikan, karena pendidikan menularkan ‘virus pembaruan’ dalam pembangunan, khususnya dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang handal.
- 3) Keseimbangan input yang diberikan oleh kelompok menengah sangat diperlukan karena selama ini kelompok ini adalah ‘penikmat’ terbesar pada output pendidikan tanpa mau memperdulikan proses pendidikannya, dengan kata lain mereka selalu menginginkan tenaga siap pakai tanpa mau berkorban.
- 4) Orientasi pembangunan kedepan adalah dengan menciptakan keselarasan, keharmonisan, melalui modernisasi dengan mengembangkan sikap-sikap positif yang konstruktif dalam rangka mewujudkan integrasi sosial yang baik.
- 5) Perlu dilakukan pemerataan distribusi pendapatan agar supaya kecemburuan sosial kelas bawah terhadap kelompok menengah bisa dieliminir
- 6) Peran kelas menengah dalam mengkritisi sumberdaya ekonomi Indonesia dengan tools ekonomi yang lebih akurat sangat dibutuhkan sehingga perekonomian Indonesia tetap stabil.
- 7) Kelas menengah Indonesia tetap diperlukan dalam proses pembangunan bangsa, tinjauan kelas menengah dapat dilihat dari sisi ekonomi dan pendidikannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Assegaf, A. R., Zakaria, A. R. Bin, & Sulaiman, A. M. (2012). The Closer Bridge towards Islamic Studies in Higher Education in Malaysia and Indonesia. *Creative Education*, 03(06), 986–992. <https://doi.org/10.4236/ce.2012.326149>
- BPS, B. P. S. (2017). *Statistik Sumberdaya Laut dan Pesisir*. Jakarta, Indonesia.
- Budiman, A., Assyaukanie, L., & Stanley, 1959-. (2006). *Kebebasan, negara, pembangunan : kumpulan tulisan, 1965-2005*. Kerja sama Freedom Institute dan Pustaka Alvabet.
- Chen, W. (2018). Problems and Countermeasures of Small and Medium-Sized Enterprises Credit Guarantee Company. *Modern Economy*, 09(03), 562–571. <https://doi.org/10.4236/me.2018.93036>
- Ervita, K., & Marfai, M. A. (2017). Shoreline Change Analysis in Demak, Indonesia. *Journal of Environmental Protection*, 08(08), 940–955. <https://doi.org/10.4236/jep.2017.88059>
- Evers, H.-D., & Institute of Southeast Asian Studies. (1973). *Modernization in South-East Asia*,. Oxford University Press. Retrieved from <http://onsearch.id/Record/IOS3107.36269>
- Goulielmos, A. M. (2018). The “Modern Greek Maritime Policy”, 1953-2018: A Critical Review of Its Legal, Economic and Institutional Framework. *Modern Economy*, 09(07), 1190–1212. <https://doi.org/10.4236/me.2018.97078>
- Ndaha, T. (n.d.). *Materi pokok pembangunan masyarakat ; ADPE 4330.3Sks/Modul 1-9 (1st ed.)*. Jakarta Karunika, Jakarta UT. Retrieved from <http://onsearch.id/Record/IOS3318.YOGYA-02090000023493>
- Rostow, W. . (1960). *The Stage Of Economic Growth: A Non Communist Manifesto*. Cambridge University Press, London.
- Titko, J., Stankevičienė, J., & Lāce, N. (2014). MEASURING BANK EFFICIENCY: DEA APPLICATION. *Technological and Economic Development of Economy*, 20(4), 739–757. <https://doi.org/10.3846/20294913.2014.984255>
- Todaro, M. P. (2015). *Economic Development (12th ed.)*. The George washington University.